

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No 12 Tahun 2007 *Tentang Alokasi Dana Desa*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri RI No 113. Tahun 2014. *pengelolaan keuangan desa pasal 20, 24, 38*.
- Undang-Undang No 23. Tahun 2014. *Pemerintah Desa*.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 *Dana Desa*
- Bank, A. D. (1997). *Publik Administration in the 21-st Century*.
- Elgia Astuti, E. (2013). *journal Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanjadesa (APBDES) (Studi pada alokasi dana desa tahun anggaran 2011didesa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*.
- Jabbara, J. (1989). *Public Service Accountability; A Comparative Perspective*,.
- Khaitu, T. S. (maret 2006). Good Corporate Governance dan penerapannya di Indonesia. *Manajemen dan Kewirausahaan*, vol.8 No1.
- Kumarian Pers, C. I.-0. (n.d.). Administrasi Publik. *Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1 No. 6. Hal 1203-1212.
- Mahsun, M. (n.d.).
(<http://www.tenagasosial.com/2014/makalahkonsepakuntabilitras-dan.html>).
- Peraturan Bupati Sampang No 9 tahun 2017 tentang pedoman teknis pelaksanaan alokasi dana desa*. (n.d.).
- Sedarmayanti. (2012). *Membangun Sistem Menejemen Kinerja guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance*. Bandung.
- Siti Ainul Wilda, D. (2017). *journal Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa -desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi jurusan akutansi, fakultas ekonomi, Universitas Jember*.
- Subroto, A. (2008). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa Di desa-desa dalam wilayah kecamatan Tlogomolyo Kabupaten Tumanggung) (tesis) Universitas Dipenogoro Semarang. Agus Subroto.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan keabsahan data*. Bandung: R&D, Alfabeta.
- Thoha. (2005). Good Governance. *Good Governance*, p. 62.